



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 11 Oktober 2016

Halaman: 1

Tak Boleh Ada Hotel Baru hingga 2017

Tingkat Hunian Masih Sangat Rendah

JOGJA-Pemerintah Kota Jogja memperpanjang moratorium izin pembangunan hotel sampai 31 Desember 2017. Dengan keputusan itu berarti moratorium diperpanjang satu tahun.

Perwal tersebut sebagai pengganti Perwal No.77/2013 tentang Moratorium Penerbitan IMB Hotel.

Keterisian hotel di Jogja saat ini masih di bawah rata-rata.

Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com

Kepastian tidak akan ada izin baru proyek hotel itu tertuang dalam Peraturan Wali (Perwal) Kota Jogja No.55/2016.

Perwal tersebut sebagai pengganti Perwal No.77/2013 tentang Moratorium Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel. "Perwal baru keluar dan berlaku sejak diundatngani 30 September

Namun 17 hotel di antaranya belum memenuhi persyaratan. Pihaknya tidak akan mengeluarkan izin selama kelegkapan izinnnya belum terpenuhi. "Kalau syarat belum lengkap izin tidak kami proses," kata dia.

Berjuang

Sementara perpanjangan moratorium izin pembangunan hotel selama setahun disayangkan oleh pengusaha hotel yang selama ini memperjuangkan agar tidak ada pembangunan hotel sampai 2019 mendatang. "Tentu kami harus berjuang lagi supaya moratorium sampai 2019," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Istidjab Danunagoro.

Menurut dia keterisian hotel di Jogja saat ini masih di bawah rata-rata. Untuk hotel berbintang keterisian kamar masih di angka 26%. Sementara hotel non bintang 56%. Terlebih, kata dia, adanya kebijakan Pemerintah Pusat soal efisiensi anggaran dan rapat-rapat di hotel jadi berpengaruh.

Sementara minat pembangunan hotel di Jogja diakuinya cukup tinggi meski yang dikejar adalah investasi. Artinya, kepemilikan hotel untuk dijual kembali dan bukan untuk dioperasikan sendiri.

Istidjab mengungkapkan saat ini ada 86 hotel berbintang dengan total kamar 8.500. Hotel non bintang sebanyak 1.100 dengan total kamar sekitar 12.500.

"Tingkat hunian hotel masih di bawah dua malam, jarang yang dua malam ke atas," kata dia.

Istidjab menilai jika tidak ada pembatasan, persaingan usaha hotel menjadi tidak sehat. Ia berharap izin pembangunan hotel tidak dikeluarkan sampai 2019 mendatang atau sampai adanya New Yogyakarta International Airport di Kulonprogo.

Lebih Lengkap Halaman 8

ndak Lanjut

Positif

Netral

ag. Hukum

mal

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005